

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar adalah dokumen perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dan mengacu pada RKPD
- b. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

- c. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$; dan
- d. Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

B. LANDASAN HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83) ;
- 5. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19) ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
 11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); dan
 14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
 15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 72)
 16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2021 nomor 39).
 - 17.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah
- b. Sebagai penjabaran Rencana Kerja pemerintah daerah kota Blitar Tahun 2022;
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- d. Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dokumen Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2022 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD pada Lampiran 1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah hasil kertas kerja di bagian Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing-masing, dengan format sebagaimana tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sesuai Lampiran 2.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara

- rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
 4. Lampirkan tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD sesuai Lampiran 3.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Sajikan tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota sesuai lampiran 4.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
Misal:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian SPM,
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Sajikan tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju sesuai Lampiran 5.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERA

Berisikan uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisikan Uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperdagin kota Blitar tahun lalu (2020) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2021) dengan mengacu pada APBD tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Disperdagin Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2020 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan
5. Program Pengembangan Pasar Tradisional
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan
7. Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan
8. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)
9. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian
11. Program Pembinaan Industri (DBHCHT)

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2021 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ;
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD
Dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021 Kota Blitar (Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Semester I tahun 2021)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
3.06	Urusan Perdagangan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,50		83	80	0	0	83	104,2
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%	100	100	100	100	100	100,0
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	54	dokumen	31	10	5	50	36	66,7
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	25	dokumen	21	8	5	63	26	104,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%		100	100	0	100	100,0
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	58	pegawai		58	58	100	58	100,0
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	9	dokumen	6	4	2	50	8	88,9
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100	100	0	0	100	100,0
	Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	42	publikasi	34	10	6	60	40	95,2
		Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	18	even	14	1	1	100	15	83,3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang ketentuan Cukai	180	orang		180	0	0	0	0,0
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%		100	0	0	100	100,0
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	46	komponen	43	11	7	64	50	108,7
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	28	macam	18	3	3	100	21	75,0
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	28	macam	16	2	2	100	18	64,3
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	144	jenis	139	31	16	52	155	107,6
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	2.800	dos	2.910	700	350	50	3.260	116,4
		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	800	porsi	500	350	150	43	650	81,3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	222	macam	189	25	25	100	214	96,4
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	60	cetakan	54	7	7	100	61	101,7
		Jumlah lembar penggandaan	178.500	lembar	130.635	15.000	7.500	50	138.135	77,4
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12	bahan bacaan	10	36	18	50	28	233,3
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	229	rakor	206	50	25	50	231	100,9
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%		100	0	0	100	100,0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	456	rekening	288	132	66	50	354	77,6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%		100	0	0	100	100,0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	59	unit	43	3	6	200	49	83,1
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya	80	unit	59	16	11	69	70	87,5
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	75	macam	40	4	4	100	44	58,7
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1	unit	1	1	0	0	1	100,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	28	macam	27	4	4	100	31	110,7
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	67,50			68	65	96,30	68	100,0
		Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	6	%	7	5	3	62	0	165,3
	Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	75	%	67	67	65	67	68	90,0
	Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Bangunan Pasar yang Direvitalisasi	21	unit	21	1	0	0	21	100,0
		Jumlah Tenaga keamanan pasar yang tersedia	245	orang	195	50	50	100	245	100,0
		jumlah pedagang pasar rakyat yang dibina	500			500	0	0	0	0,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Keg.Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Usaha Perdagangan yang dibina	820	pedagang	1.088	1020	250	25	1.338	163,2
	Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan	500			500	250	50	250	50,0
		Jumlah pedagang yang mendapatkan fasilitasi promosi perdagangan	30			30	30	100	30	100,0
		Jumlah usaha perdagangan yang didata	6.000	unit usaha	2.440	2.000	0	0	2.440	40,7
	Sub Keg. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	2.790	unit usaha	1.690	500	50	10	1.740	62,4
		Jumlah PKL yang didata	3.550	unit usaha	2.250	1.800	0	0	2.250	63,4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100	%		100	100	100	100	100,0
	Keg. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Perdagangan	12	laporan		12	6	50	6	50,0
	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Informasi harga dan bahan pokok	3.208	Informasi Harga	2.998	640	405	63	3.403	106,1
		Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	4.790	orang	3.140	420	0	0	3.140	65,6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
		Jumlah laporan money/ operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol)	2	laporan		2	0	0	0	0,0
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	60	%	37	30	1,73	5,76	39	64,3
	Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	28.577	Alat UTTP	5.891	5.000	161	3,22	6.052	21,2
	Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	28.577	Alat UTTP	5.891	5.000	161	3,22	6.052	21,2
	Sub Keg. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	1.650	orang	320	230	0	0,00	320	19,4
		Jumlah alat UTTP yang didata	20.000	Alat UTTP	18.057	6.000	0	0,00	18.057	90,3
		Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	3.000	unit	1.400	750	90	12,00	1.490	49,7

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM	13	%	0	1	0	0	11	84,6
	Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	3.005	unit usaha industri	1.920	357	50	14	1.970	65,6
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Industri Kecil yang dilatih	2.405	unit usaha industri	1.560	337	50	15	1.610	66,9
		Jumlah monev pelatihan yang dilaksanakan	30	dokumen	10	1	0	0	10	33,3
		Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitas HAKI	10	unit usaha industri		10	9	90	9	90,0
		Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitas PIRT	10	unit usaha industri		10	0	0	0	0,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peningkatan industri kecil	150	unit usaha industri	13	10	0	0	13	8,7
		Jumlah unit usaha yang terfasilitasi mengikuti pameran produk industri daerah	600	Unit usaha	360	80	0	0	360	60,0
		Jumlah pengunjung pameran yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	45	Pengunjung	19	10	0	0	19	42,2

Tabel. 2.2 Realisasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) tahun 2020

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	%	100	100	100
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	macam	46	46	100
		Jumlah barang cetakan yang tersedia	cetakan	13	13	100
		Jumlah lembar penggandaan	lembar	44.000	53.600	122
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	bahan bacaan	2	2	100
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	dos	1.000	1.360	100
		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	porsi	200	200	100
		Jumlah paket makanan khas daerah yang tersedia	macam	4	4	100
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	rakor	30	30	100
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	orang	50	50	100
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	rekening	108	108	100
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	unit	16	16	100
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	komponen	8	8	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		bangunan kantor yang tersedia				
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	macam	25	25	100
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	macam	2	2	100
		Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	macam	5	5	100
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	macam	3	3	100
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	3	11	367
		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	unit	1	1	100
		Jumlah mebeulair yang terpelihara	macam	2	2	100
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	dokumen	4	4	100
6	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	dokumen	3	3	72
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	%	100	100	100
7	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah Event daerah dan Hari Besar Nasional yang diikuti	even	1	1	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
8	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	publikasi	14	14	100
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	%	100	100	100
9	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	dokumen	9	9	100
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERDAGANGAN	Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	%	5	4,44	85
10	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	unit usaha	100	100	100
		Jumlah PKL yang didata	unit usaha	500	750	150
11	Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang dibina	pedagang	300	300	100
		Jumlah usaha perdagangan yang didata	unit usaha	2.000	1.866	93,3
V	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	%	65	67	103
12	Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional	Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi	unit	7	7	100
VI	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERDAGANGAN	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain	Kontak dagang	2	2	100
13	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perdagangan)	Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha perdagangan dalam dan luar daerah	fasilitasi promosi	1	1	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
VII	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang	%	1,3	1,19	91,5
14	Pengelolaan Pengawasan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera Ulang	Alat UTTP	112	111	99,1
		Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	orang	80	50	62,5
		Jumlah alat UTTP yang didata	Alat UTTP	6.000	9.317	155,3
		Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	unit	500	650	130
15	Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol	Jumlah publikasi informasi harga bahan pokok	Informasi Harga	640	800	125,0
		Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	orang	420	420	100,0
VIII	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase Pelanggar Barang Kena Cukai Ilegal	%	0	0	100
16	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah Pedangan Rokok yang dimintai Informasi Tentang Pita Cukai Palsu	pedagang rokok	300	300	100
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	%	1,25	-1,05	-184

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
17	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	jumlah peningkatan industri kecil	unit usaha industri	10	-51	-610
		jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah	Unit usaha	0	0	0
		Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	Pengunjung	0	0	0
X	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)	Persentase IHT yang Menerapkan GMP	%	75	75	100
18	Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan good manufacturing practises bagi IHT	Jumlah pengusaha Industri Hasil Tembakau yang mengikuti sosialisasi penerapan GMP	orang	100	100	100
XI	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase Industri Kecil Terlatih	%	6,25	10	160
19	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Industri Kecil yang Dilatih	unit usaha industri	60	40	67
		jumlah dokumen monev pelatihan	dokumen	10	0	0
		jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan paska pelatihan	unit usaha	15	15	100
		Jumlah Jenis Bahan, peralatan dan perlengkapan kesehatan untuk pandemic Covid-19 yang tersedia	unit	9	9	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
20	Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	Pengunjung	15	15	100

Dari tabel 2.2 di atas, Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target Kinerja Tahun 2020

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERDAGANGAN	Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	%	5	4,44	85
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang	%	1,3	1,19	91,5
3	Pengelolaan Pengawasan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera Ulang	Alat UTTP	112	111	99,1
		Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	orang	80	50	62,5
4	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	%	1,25	-1,05	-184
5	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	jumlah peningkatan industri kecil	unit usaha industri	10	-51	-610
		jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah	Unit usaha	0	0	0

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	Pengunjung	0	0	0
6	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Industri Kecil yang Dilatih	unit usaha industri	60	40	67
		jumlah dokumen monev pelatihan	dokumen	10	0	0
		jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan paska pelatihan	unit usaha	15	15	100
		Jumlah Jenis Bahan, peralatan dan perlengkapan kesehatan untuk pandemic Covid-19 yang tersedia	unit	9	9	100

Dari Tabel di atas, ada beberapa program dan kegiatan yang pencapaian kinerjanya tidak tercapai, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja tersebut, antara lain :

1. Untuk pelayanan tera/tera ulang, Kota Blitar Belum mampu melakukan pelayanan tera/tera ulang sendiri, karena terkendala cap tanda tera yang baru keluar akhir tahun 2020 dan alat standard yang perlu dikalibrasi agar pelayanan sah dilakukan menurut aturan
2. Karena adanya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak ke pedagang dan industry kecil

Program dan Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan yang memenuhi target Kinerja Tahun 2020

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	%	100	100	100
2	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	macam	46	46	100
		Jumlah barang cetakan yang tersedia	cetakan	13	13	100
		Jumlah lembar penggandaan	lembar	44.000	53.600	122
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	bahan bacaan	2	2	100
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	dos	1.000	1.360	100
		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	porsi	200	200	100
		Jumlah paket makanan khas daerah yang tersedia	macam	4	4	100
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	rakor	30	30	100
4	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	orang	50	50	100
5	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	rekening	108	108	100
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	unit	16	16	100
		Jumlah komponen instalasi	komponen	8	8	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia				
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	macam	25	25	100
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	macam	2	2	100
		Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	macam	5	5	100
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	macam	3	3	100
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	3	11	367
		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	unit	1	1	100
		Jumlah mebeulair yang terpelihara	macam	2	2	100
6	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	dokumen	4	4	100
7	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	dokumen	3	3	72
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	%	100	100	100
9	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah Event daerah dan Hari Besar Nasional yang diikuti	even	1	1	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
10	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	publikasi	14	14	100
11	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	%	100	100	100
12	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	dokumen	9	9	100
13	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	unit usaha	100	100	100
		Jumlah PKL yang didata	unit usaha	500	750	150
14	Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang dibina	pedagang	300	300	100
		Jumlah usaha perdagangan yang didata	unit usaha	2.000	1.866	93,3
15	Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional	Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi	unit	7	7	100
16	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERDAGANGAN	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain	Kontak dagang	2	2	100
17	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perdagangan)	Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha perdagangan dalam dan luar daerah	fasilitasi promosi	1	1	100
18	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase Pelanggar Barang Kena Cukai Ilegal	%	0	0	100
19	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di	Jumlah Pedagang Rokok yang dimintai Informasi Tentang Pita Cukai Palsu	pedagang rokok	300	300	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	peredaran atau tempat penjualan eceran					
20	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)	Persentase IHT yang Menerapkan GMP	%	75	75	100
21	Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan good manufacturing practises bagi IHT	Jumlah pengusaha Industri Hasil Tembakau yang mengikuti sosialisasi penerapan GMP	orang	100	100	100
22	Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	Pengunjung	15	15	100

Faktor-faktor pendukung tercapainya target kinerja program dan kegiatan seperti pada tabel di atas, antara lain :

- Sumber Daya Manusia yang memadai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Kesesuaian substansi kegiatan dengan kegiatan dan program, sehingga saling mendukung pencapaian kinerja
- Penyesuaian target kinerja karena adanya pandemi Covid-19
- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Adapun Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan yang melebihi target Kinerja Tahun 2020

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol	Jumlah publikasi informasi harga bahan pokok	Informasi Harga	640	800	125,0
		Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	orang	420	420	100,0
	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase Industri Kecil Terlatih	%	6,25	10	160

Faktor – faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program / kegiatan adalah.

1. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Ketaatan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya sumber dana yang memadai.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang rendah

Adapun kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau perbaikan perencanaan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
2. Dalam perencanaan dan penganggaran harus benar – benar diperhitungkan dengan seksama.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2021 dapat dikatakan tidak berhasil, karena berkaitan dengan ekonomi yang sangat terdampak oleh adanya

pandemi Covid-19, sehingga dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

No.	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD pada Tahun			Realisasi Capaian	Proyeksi capaian pada tahun		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan		-	1,5 %	1,75%	1,75 %	-36.3	1,75%	1,75 %	pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia, khususnya Kota Blitar, yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian di segala lini, sehigga mengakibatkan pencapaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan drastis
2	Persentase Peningkatan Pengawasan		-	7,5%	10 %	-	4.78	10 %	-	
3	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri		-	0,4%	0,45%	0,5 %	-4.19	0,45%	0,5 %	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Pertumbuhan sektor perdagangan
2. Peningkatan mutu dan daya saing IKM Kota Blitar

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2026 disajikan secara lengkap pada tabel 2.7 Dokumen RENJA ini.

Dari review terhadap rancangan awal RKPD, ada beberapa perubahan pada pagu indikatifnya. Hal ini dikarenakan penyesuaian pagu yang ada dan skala prioritas kegiatan.

Tabel 2.7
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA BLITAR

SKPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				15.872.901.100					15.435.659.013	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				13.962.901.100					13.400.786.233	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	6.600.972.700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	6.783.581.783	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	14.818.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	26.339.100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi,	10 dokumen	7.168.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja,	10 dokumen	8.923.300	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)					RKA, DPA, PRKA, DPPA)			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKJIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal)	8 dokumen	7.650.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKJIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal)	8 dokumen	17.415.800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.867.732.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.816.910.833	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	58 pegawai	5.823.754.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	58 pegawai	5.811.726.833	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)	3 laporan	43.978.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)	3 laporan	5.184.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	79.551.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	200.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	3 even 10 publikasi	79.551.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	3 even 10 publikasi	200.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	314.454.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	377.287.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 komponen	11.155.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 komponen	11.094.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	3 macam 2 macam	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	3 macam 2 macam	66.061.600	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	31 macam	22.451.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	31 macam	44.723.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia	700 dos	59.464.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia	800 dos	99.353.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	25 macam 350 porsi				Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	30 macam 300 porsi		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah barang cetak yang tersedia Jumlah lembar penggandaan	7 cetakan 15000 lembar	7,168,100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah barang cetak yang tersedia Jumlah lembar penggandaan	6 cetakan 20000 lembar	38.124.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	36 bahan bacaan	7.812.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	36 bahan bacaan	7.440.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	50 rakor	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	50 rakor	110.490.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	177.576.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	174.107.850	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk listrik, air, telepon, internet)	132 rekening	177.576.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk listrik, air, telepon, internet)	132 rekening	174.107.850	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	146.841.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	188.937.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	3 unit 16 unit	77.147.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	3 unit 16 unit	90.179.300	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Mesin Fax)	4 macam	13.618.700	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Mesin Fax)	4 macam	15.550.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	40.992.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	59.682.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas	4 macam	15.082.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang	4 macam	23.525.200	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			angin yang menempel di dinding, mebelair)			atau Bangunan Lainnya		menempel di dinding, mebelair)			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Blitar	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik Persentase usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas	69 % 4,75 %	6.161.928.400	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Blitar	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik Persentase usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas	69 % 4,75 %	5.863.964.550	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Pesentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	70 %	5.161.928.400	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Pesentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	70 %	4.928.678.450	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Bangunan Pasar yang Direvitalisasi jumlah pedagang pasar rakyat yang dibina Jumlah Tenaga keamanan pasar yang tersedia Jumlah Tenaga kebersihan pasar yang tersedia	5 unit 5223 pedagang 50 orang 30 orang	5.161.928.400	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Bangunan Pasar yang Direvitalisasi jumlah pedagang pasar rakyat yang dibina Jumlah Tenaga keamanan pasar yang tersedia Jumlah Tenaga kebersihan pasar yang tersedia	4 unit 500 pedagang 50 orang 30 orang	4.928.678.450	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Blitar	Jumlah Usaha Perdagangan yang dibina	525 Unit Usaha Perdagangan	1.000.000.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Blitar	Jumlah Usaha Perdagangan yang dibina	525 Unit Usaha Perdagangan	935.286.100	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah usaha perdagangan yang dibina Jumlah usaha perdagangan yang didata	500 pedag 2000 unit usaha	400.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah usaha perdagangan yang dibina Jumlah usaha perdagangan yang didata	2000 unit usaha 500 pedagang	470.288.000	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina Jumlah PKL yang didata	400 pedagang 750 pedagang	600.000.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina Jumlah PKL yang didata	500 pedagang 1820 pedagang	464.998.100	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Blitar	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100 %	200.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Blitar	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100 %	177.202.700	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Perdagangan	12 laporan	7,168,100	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Perdagangan	12 laporan	177.202.700	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	jumlah laporan money/ operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol) jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol Jumlah Publikasi Informasi harga dan bahan pokok	8 laporan 420 orang 640 informasi harga	160.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	jumlah laporan money/ operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol) jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol Jumlah Publikasi Informasi harga dan bahan pokok	2 laporan 210 orang 700 informasi harga	177.202.700	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar			40.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar			0	
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kota Blitar	Jumlah pedagang rokok yang dimintai informasi tentang pita cukai palsu	1680 pedagang rokok	40.000.000	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kota Blitar	Jumlah pedagang rokok yang dimintai informasi tentang pita cukai palsu		0	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Blitar	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	35 %	850.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Blitar	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	35 %	576.037.200	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Blitar	Jumlah alat UTTP yang bertanda terasah	5.500 Unit Alat UTTP	850.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Blitar	Jumlah alat UTTP yang bertanda terasah	5.500 Unit Alat UTTP	576.037.200	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Blitar	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	5000 alat UTTP	600.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Blitar	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	5500 alat UTTP	250.387.900	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Blitar	Jumlah alat UTTP yang didata Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	6000 alat uttp 1360 orang 750 unit	250.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Blitar	Jumlah alat UTTP yang didata Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	7000 alat uttp 300 orang 750 unit	325.649.300	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kota Blitar			150.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kota Blitar			0	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Blitar			150.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Blitar			0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha perdagangan dalam dan luar daerah	4 fasilitasi promosi	150.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha perdagangan dalam dan luar daerah		0	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.910.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.034.872.780	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Blitar	Persentase peningkatan IKM	2 %	1.910.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Blitar	Persentase peningkatan IKM	2 %	2.034.872.780	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	155 unit usaha industri	1.910.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	155 unit usaha industri	2.034.872.780	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	jumlah dokumen monev pelatihan Jumlah Industri Kecil yang dilatih jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan paska pelatihan	8 dokumen 140 unit usaha industri 8 unit usaha	400.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	jumlah dokumen monev pelatihan Jumlah Industri Kecil yang dilatih Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitasi HAKI Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitasi PIRT	1 dokumen 125 unit usaha industri 20 unit usaha 10 unit usaha	371.011.680	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Blitar	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	15 pengunjung	350.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Blitar	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama		0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Blitar	Jumlah pengusaha Industri Hasil Tembakau yang mengikuti Sosialisasi penerapan Good Manufacturing Practises bagi IHT	100 orang	60.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah pengusaha Industri Hasil Tembakau yang mengikuti Sosialisasi penerapan Good Manufacturing Practises bagi IHT		0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama jumlah peningkatan industri kecil jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah	15 pengunjung 50 unit usaha industri 200 unit usaha industri	1.100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama jumlah peningkatan industri kecil jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah	11 pengunjung 11 unit usaha industri 80 unit usaha industri	1.663.861.100	
Jumlah				15.872.901.100						15.435.659.013	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan OPD.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun pelaksanaan musrenbang baik tingkat RT / RW, Kelurahan, Kecamatan maupun forum OPD

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RT / RW

Musrenbang tingkat RT / RW merupakan penjaringan dan penggalan aspirasi masyarakat tingkat bawah (*grass roots*) yang dilaksanakan di tingkat RW. Dalam tahap ini dilakukan inventarisasi dan pembahasan berbagai bentuk usulan masyarakat untuk diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan bukan sekedar keinginan kelompok tertentu. Dengan musrenbang tingkat RT / RW ini diharapkan seluruh aspirasi warga masyarakat benar-benar dapat diakomodasikan dan disalurkan sehingga program-program yang akan direncanakan betul-betul berdasarkan kebutuhan seluruh masyarakat. Diharapkan pada tahap ini telah diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas yaitu benar-benar merefleksikan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Musrenbang Kelurahan

Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Musrenbang kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi usulan kebutuhan pembangunan yang terpadu yang di dalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani serta mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT / RW di kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lintas RW antar dua kelurahan yang berbeda yang diusulkan lebih lanjut ke musrenbang tingkat kecamatan.

c. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah pembangunan tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat Kecamatan untuk menentukan prioritas dan memantapkan usulan kegiatan pembangunan masing-masing Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sekaligus menyepakati rencana kegiatan lintas Kelurahan dan Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan Rencana PD Kota pada tahun berikutnya.

Pada musrenbang Kecamatan, usulan dari Kelurahan diklasifikasikan dan didiskusikan sehingga akan didapatkan kegiatan prioritas pada tingkat kecamatan yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan serta kegiatan lain yang masih bisa ditangguhkan pelaksanaannya. Formulasi yang sudah terpilih secara rinci kemudian disampaikan secara formal dalam forum SKPD agar terjadi sinkronisasi program / kegiatan dengan SKPD

terkait. Pada musrenbang Kecamatan peran SKPD melalui perwakilannya adalah memberikan arahan dan mendetailkan usulan dari hasil Musrenbang Kelurahan dalam rangka memantapkan usulan dari masing-masing Kelurahan.

d. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi / sub fungsi, kegiatan / sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan PD sebagai upaya untuk mengisi Rencana Kerja PD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait, sehingga dalam pelaksanaan forum PD diharuskan menghadirkan perwakilan dari masing-masing Kecamatan dengan membawa hasil Musrenbang Kecamatan.

PD. Namun demikian dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan forum PD dapat tetap dilakukan. Jumlah forum PD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan BAPPEDA, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Dalam Forum PD diharapkan terjadi proses sinkronisasi usulan program / kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program / kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program / kegiatan

TABEL 2.8

USULAN PROGRAM & KEGIATAN DARI MASYARAKAT & PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022 KOTA BLITAR

SKPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	A. USULAN MELALUI MUSRENBANG				
I	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
	Subkeg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				
1	pelatihan tentang pengemasan produk, penjualan produk dan pengurusan PIRT secara kolektif kepada 5 orang IKM di Kelurahan Turi	RT 3 RW II Kelurahan Turi, Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo, Seluruh Kelurahan	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan	5 IKM	
2	pelatihan pengemasan produk untuk 10 orang produsen makanan	RW 04, Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan, Seluruh Kelurahan	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan	10 IKM	
3	pelatihan batik dan jahit dengan 15 orang peserta selama 2-7 hari masa pelatihan	RW IX/ RT 01, Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan, Seluruh Kelurahan	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan	15 IKM	
4	pelatihan pengemasan produk keripik singkong yang inovatif	Warga RW 02 Kelurahan Ngadirejo, Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul, Seluruh Kelurahan	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan	40 IKM	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, disebutkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan

Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :

- Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
- Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi

- Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ; dan
 - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran :
- Pembangunan Wilayah Sumatera;
 - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
 - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
 - Pembangunan Wilayah Kalimantan;
 - Pembangunan Wilayah Sulawesi;
 - Pembangunan Wilayah Maluku; dan
 - Pembangunan Wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya saing, dengan sasaran :
- Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;

- Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
- Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran :
- Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan

bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :

- Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan
- Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

7. Memperkuat Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan

publik dengan sasaran :

- Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal;
- Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
- Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2022, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :

- Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;

- Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
- Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ; dan
- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2022 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rencangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran

dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar di tahun 2022 sebagaimana dalam **Tabel 3.1** di bawah ini.

Tabel 3.1

Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2020	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	24,75%	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	1,75 %
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	9,79 %	Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas Industri	0,75 %

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, LOKASI, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Pencapaian Visi dan Misi Walikota Blitar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar telah menetapkan tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam RENSTRA Dinas tahun 2021-2026 dan sudah dibahas di Bab sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan strategi – strategi antara lain, yaitu :

1. Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran, dengan kebijakan :
 - Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas
 - Optimalisasi pengawasan perdagangan
2. Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM), dengan kebijakan :
 - Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
 - Peningkatan pemasaran hasil industri
 - Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor

Dari strategi dan kebijakan yang ada, maka disusunlah program dan kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mendukung langsung pencapaian sasaran dan tujuan dinas, dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2022 adalah yaitu ada 5 Program dengan 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Kegiatan :

- 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

III. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan Kegiatan :

- 1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

IV. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan Kegiatan :

- 1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

- b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

V. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan Kegiatan :

- 1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Nama PD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

[illegible]

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal)	Kota Blitar	8 dokumen	17.415.800	Dana Transfer Umum-DAU	8 dokumen	803.281.500
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	5.816.910.833	Dana Transfer Umum-DAU	100 %	6.161.118.700
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Kota Blitar	58 pegawai	5.811.726.833	Dana Transfer Umum-DAU	58 pegawai	6.114.941.600
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)	Kota Blitar	3 laporan	5.184.000	Dana Transfer Umum-DAU	3 laporan	46.177.100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kota Blitar	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	100 %	83.528.600
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Kota Blitar	3 even	200.000.000	DBHCHT	3 even 10 publikasi	83.528.600

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah		10 publikasi					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	377.287.000	Dana Transfer Umum- DAU		100 %	332.676.100
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Blitar	11 komponen	11.094.800	Dana Transfer Umum- DAU		11 komponen	11.713.600
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Kota Blitar	3 macam 2 macam	66.061.600	Dana Transfer Umum- DAU		3 macam 2 macam	26.250.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Kota Blitar	31 macam	44.723.000	Dana Transfer Umum- DAU		31 macam	23.573.900
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Kota Blitar	800 dos 30 macam	99.353.600	Dana Transfer Umum- DAU		800 dos 30 macam 300 porsi	62.438.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	300 porsi				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Kota Blitar	6 cetakan	38.124.000	Dana Transfer Umum-DAU	6 cetakan	40.498.000
				Jumlah lembar penggandaan		20000 lembar			20000 lembar	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kota Blitar	36 bahan bacaan	7.440.000	Dana Transfer Umum-DAU	36 bahan bacaan	8.202.600
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Kota Blitar	50 rakor	110.490.000	Dana Transfer Umum-DAU	50 rakor	160.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	174.107.850	Dana Transfer Umum-DAU	100 %	186.454.800
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk listrik, air, telepon, internet)	Kota Blitar	132 rekening	174.107.850	Dana Transfer Umum-DAU	132 rekening	186.454.800

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar	100 %	188.937.000	Dana Transfer Umum- DAU		100 %	154.183.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Kota Blitar	3 unit 16 unit	90.179.300	Dana Transfer Umum- DAU		3 unit 16 unit	81.005.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Mesin Fax)	Kota Blitar	4 macam	15.550.500	Dana Transfer Umum- DAU		4 macam	14.299.650
				Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Kota Blitar	1 unit	59.682.000	Dana Transfer Umum- DAU		1 unit	43.041.600
				Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exaust fan, kipas angin yang	Kota Blitar	4 macam	23.525.200	Dana Transfer Umum- DAU		4 macam	15.836.750

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Usaha Perdagangan yang dibina	Kota Blitar	525 Unit Usaha Perdagangan	935.286.100	Dana Transfer Umum- DAU		550 Unit Usaha Perdagangan	9.517.316.000
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang dibina Jumlah usaha perdagangan yang didata	Kota Blitar	2000 unit usaha 500 pedagang	470.288.000	Dana Transfer Umum- DAU		2000 unit usaha 500 pedagang	517.316.000
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina Jumlah PKL yang didata	Kota Blitar	500 pedagang 1820 pedagang	464.998.100	Dana Transfer Umum- DAU		500 pedagang 1820 pedagang	9.000.000.000
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	Kota Blitar	100 %	177.202.700	Dana Transfer Umum- DAU		100 %	205.000.000
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	12 laporan	177.202.700	Dana Transfer Umum- DAU		12 laporan	205.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah laporan moneyv/ operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol) jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol Jumlah Publikasi Informasi harga dan bahan pokok	Kota Blitar	2 laporan 210 orang 700 informasi harga	177.202.700	Dana Transfer Umum-DAU	2 laporan 210 orang 700 informasi harga	205.000.000
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	Kota Blitar	35 %	576.037.200	Dana Transfer Umum-DAU	40 %	6.633.675.000
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	Kota Blitar	5.500 Unit Alat UTTP	576.037.200	Dana Transfer Umum-DAU	5.700 Unit Alat UTTP	6.633.675.000
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	Kota Blitar	5500 alat UTTP	250.387.900	Dana Transfer Umum-DAU	5500 alat UTTP	6.275.425.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTTP yang didata	Kota Blitar	7000 alat uttp	325.649.300	Dana Transfer Umum-DAU	7000 alat uttp	358.250.000
				Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi		300 orang			300 orang	
				Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi		750 unit			750 unit	
			URUSAN PERINDUSTRIAN			2.034.872.780				2.200.000.000
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM	Kota Blitar	2 %	2.034.872.780	Dana Transfer Umum-DAU	2,5 %	2.200.000.000
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	Kota Blitar	155 unit usaha industri	2.034.872.780	Dana Transfer Umum-DAU	175 unit usaha industri	2.200.000.000
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	jumlah dokumen monev pelatihan	Kota Blitar	1 dokumen	371.011.680	Dana Transfer Umum-DAU	1 dokumen	450.000.000
				Jumlah Industri Kecil yang dilatih		125 unit usaha industri			125 unit usaha industri	
				Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitas HAKI		20 unit usaha			20 unit usaha	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitas PIRT		10 unit usaha				10 unit usaha	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama jumlah peningkatan industri kecil jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah	Kota Blitar	11 pengunjung 11 unit usaha industri 80 unit usaha industri	1.663.861.100	Dana Transfer Umum- DAU		11 pengunjung 11 unit usaha industri 80 unit usaha industri	1.750.000.000
TOTAL									15.435.659.013			55.034.760.200

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2022 yang berpedoman pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun (2021-2026) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2022. Rencana Kerja ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020 dan 2021, sebagai pedoman bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
 - a. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Dinas Perdagangan dan Perindustrian didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - b. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun 2022 dan tahun 2023.
 - c. Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD
2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
 - a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja)

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2022;
- b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2022 ;
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.
 - d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2022 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana
- d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, sajian dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat kepada siapapun juga atau setidaknya dapat mengetahui kedudukan tugas dan fungsi serta kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar. Memperhatikan percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mengingat rencana kerja dilakukan dengan kurun waktu satu tahun anggaran maka untuk mencapai tujuan sesuai dengan target masing-masing kegiatan perlu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar.

Blitar, 9 Juli, 2021

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Blitar



ARIANTO S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691018 199101 1 001